

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN MADIUN MENURUT PENGELUARAN



2018 -2022



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MADIUN**

BPS-Statistics Of Madiun Regency

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN MADIUN MENURUT PENGELUARAN



2018 -2022



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MADIUN**

BPS-Statistics Of Madiun Regency

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN MADIUN
MENURUT PENGELUARAN 2018-2022**

ISBN/ *ISBN*: -

Nomor Publikasi: 35190.22206

Katalog BPS: 9302023.3519

Ukuran Buku: 21,5 cm x 29,7 cm

Jumlah halaman: xii+65 halaman

Naskah:

BPS KABUPATEN MADIUN

Gambar Kulit:

BPS KABUPATEN MADIUN

Diterbitkan Oleh:

©Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun

Dicetak oleh/*Printed by*:

CV. Azka Pratama, (Cetakan I/1st *Printed* : Mei/Mei2022)

UD Remaja, (Cetakan II/2nd *Printed* : Juni/June2022)

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN / DRAFTING TEAM

Penanggungjawab Umum/*General in Charge*:

Herlina Prasetyowati Sambodo SST.,M.Si

Penyunting/*Editor*:

Agung. Pambudi, SST.

Penulis/*Writer*:

Endang Susilaningrum SE

Pengolah Data/*Data Processor*:

Endang Susilaningrum S.E.

Gambar Kulit/*Cover Design*:

Subdirektorat Konsolidasi Neraca Produksi Regional

KATA PENGANTAR

Publikasi PDRB menurut Pengeluaran Tahun 2018-2022 ini merupakan kelanjutan dari penerbitan tahun-tahun sebelumnya yang disusun oleh BPS Kabupaten Madiun. Publikasi ini menyajikan tinjauan perkembangan perekonomian Kabupaten Madiun secara deskriptif.

Publikasi ini menyajikan gambaran PDRB yang dirinci menurut Pengeluaran yang terdiri dari tujuh kategori. Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta telah menerapkan konsep *System of National Accounts* 2008 seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*. Publikasi ini disusun dengan harapan mampu menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan maupun evaluasi pembangunan daerah Kabupaten Madiun serta memenuhi kebutuhan para pengguna data. Untuk keperluan analisis sederhana disusun tabel-tabel yang berisikan angka persentase maupun indeks-indeks tertentu yang lazim digunakan dalam penyajian angka PDRB. Dicantumkan juga konsep atau definisi yang digunakan agar para pemakai data dapat memahami uraian ringkas yang diberikan serta memanfaatkan sebaik mungkin publikasi ini.

Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan publikasi ini terutama kepada instansi pemerintah dan swasta yang telah memberikan datanya sebagai dasar penyusunan PDRB. Saran dan kritik untuk penyempurnaan publikasi ini sangat kami harapkan. Semoga buku ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengguna data dan para mengambil kebijakan.

Madiun, April 2023
BPS Kabupaten Madiun
Kepala,

Herlina Prasetyowati Sambodo SST, M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Grafik	vii
Daftar Lampiran	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	3
1.2 Perubahan Tahun Dasar PDRB	6
BAB 2 METODA ESTIMASI DAN SUMBER DATA	11
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga	13
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT	15
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah	17
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	19
2.5 Perubahan Inventori (PI)	21
2.6 Ekspor-Impor	24
BAB 3 TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN MADIUN MENURUT PDRB PENGELUARAN 2018-2022	25
3.1 Perkembangan PDRB Pengeluaran	29
3.2 Perkembangan Komponen PDRB Pengeluaran	39
3.2.1 Konsumsi Akhir Rumah Tangga	39
3.2.2 Konsumsi Akhir LNPRT	41
3.2.3 Konsumsi Akhir Pemerintah	42
3.2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	46
3.2.5 Perubahan Inventori	47
3.2.6 Ekspor Barang dan Jasa	48
BAB 4 PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB PENGELUARAN KABUPATEN MADIUN 2018-2022	51
4.1 PDRB (Nominal)	53
4.2 Proporsi Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB	54
4.3 <i>Incremental Capital Output Ratio (ICOR)</i>	54
PENUTUP	57
LAMPIRAN	59

DAFTAR TABEL

Tabel 1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Madiun, 2018-2022	29
Tabel 2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Madiun, 2018-2022	31
Tabel 3	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Madiun, 2018-2022	34
Tabel 4	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Pengeluaran Kabupaten Madiun, 2018-2022	36
Tabel 5	Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Madiun, 2018-2022	38
Tabel 6	Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Madiun, 2018-2022	38
Tabel 7	Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah tangga Kabupaten Madiun, 2018-2022	40
Tabel 8	Struktur Komponen Konsumsi Rumah tangga Kabupaten Madiun, 2018-2022	42
Tabel 9	Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Madiun, 2018-2022	44
Tabel 10	Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT Kabupaten Madiun, 2018-2022	47
Tabel 11	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Madiun 2018-2022	48
Tabel 12	Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Madiun, 2018-2022	49
Tabel 13	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Madiun, 2018-2022	53
Tabel 14	Perkembangan Ekspor Kabupaten Madiun, 2018-2022	54
Tabel 15	Perkembangan Impor Kabupaten Madiun, 2018-2022	55

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Madiun, 2018-2022	30
Grafik 2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Madiun, 2018-2022	32
Grafik 3	Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Madiun, 2018-2022	33
Grafik 4	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Madiun, 2018-2022	33
Grafik 5	Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Madiun, 2018-2022	37

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel 1	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Madiun, 2018-2022	63
Tabel 2	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Madiun, 2018-2022	63
Tabel 3	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Madiun, 2018-2022	64
Tabel 4	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Madiun, 2018-2022	64
Tabel 5	Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran Kabupaten Madiun 2018-2022	65
Tabel 6	Laju Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran Kabupaten Madiun, 2018-2022	65



PENDAHULUAN

1.1. PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, di samping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (*frame work*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran itu menggambarkan hasil “akhir” dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB Pengeluaran ini seperti variabel Pengeluaran Konsumsi Akhir, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan impor.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure*) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (*production*). Sungguhpun demikian, PDRB Pengeluaran diestimasi secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDRB Produksi menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi)¹. Sedangkan PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*) barang dan jasa.

Secara konsep² penghitungan PDRB dari sisi yang berbeda di atas dimaksudkan untuk: i) memastikan konsistensi dan kelengkapan di dalam membuat estimasi; ii) memberi manfaat lebih di dalam melakukan analisis; dan iii) mengontrol kelayakan hasil estimasi. Secara teoritis, kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar (*equivalent*). Namun karena pendekatan estimasi dan metoda pengukuran yang digunakan berbeda, maka akan muncul selisih statistik (*statistical discrepancy*).

¹ Termasuk di dalamnya penyusutan dan pajak tidak langsung “neto” (pajak tidak langsung dikurangi subsidi)

² *Handbook of National Accounting. Accounting for Production: Sources and Methods (Series F no 30 United Nations)*

Dengan demikian PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk “permintaan akhir”. Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen Ekspor barang dan jasa.

Dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir masyarakat tersebut, tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari luar wilayah atau luar negeri (impor). Berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat di dalamnya akan terkandung produk impor. Sehingga dalam mengukur besarnya nilai tambah domestik (PDRB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan dari penghitungan konsumsi atau permintaan akhir. Tingginya permintaan tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik, sehingga kondisi ini menjadi peluang bagi masuknya produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, perdagangan produk impor terus berkembang baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya.

Secara konsep, PDRB Produksi (Y) sama besar dengan PDRB Pengeluaran (E), namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan pengukuran antar keduanya juga berbeda. Dalam penyajian data PDRB, perbedaan ini diletakkan pada sisi PDRB Pengeluaran. Unsur yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain adalah konsep dan basis pengukuran, metoda dan cakupan pengukuran, serta data dasar yang digunakan untuk estimasi. Melalui penjelasan ini para pengguna data PDRB tidak mempermasalahkan adanya perbedaan (*statistical discrepancy*) tersebut.

Penyusunan data **PDRB Pengeluaran** juga dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana “pendapatan” (Y) yang tercipta melalui proses produksi menjadi sumber pendapatan masyarakat³, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir.

Dari sudut pandang lain, PDRB Pengeluaran juga menjelaskan penggunaan dari sebagian besar produk domestik bruto untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, atau dengan istilah yang berbeda disebut sebagai “**output akhir (final output)**”. Mengkaitkan antara pendapatan dan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dari produk domestik maupun impor (termasuk untuk diekspor) merupakan bentuk analisis yang sederhana dari data PDRB. Keharusan memiliki jumlah yang sama pada kedua model pendekatan PDRB tersebut, secara simultan dapat ditunjukkan melalui model atau persamaan *Keynesian* sbb :

$$Y = C + GFCF + \Delta \text{ Inventori} + X - M$$

Y (<i>Income</i>)	= PDRB Produksi
C (<i>Consumption</i>)	= Konsumsi akhir
GFCF (<i>Gross Fixed Capital Formation</i>)	= Pembentukan Modal Tetap Bruto
Δ Inventori	= Perubahan Inventori
X	= Ekspor
M	= Impor

Persamaan di atas menunjukkan pendapatan atau nilai tambah bruto dari hasil penghitungan PDRB Produksi akan “identik” dengan PDRB Pengeluaran. Jika Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi akhir, dan GFCF serta Δ Inventori merupakan bentuk investasi fisik, maka selisih antara ekspor dengan impor menggambarkan surplus atau defisit

3. - Yang dimaksud adalah rumah tangga, pemerintah, lembaga non profit yang melayani rumah tangga serta sektor produksi (produsen) di wilayah domestik
 - Disebut sebagai pendekatan “riil”
 - Siklus ekonomi secara umum yang menjelaskan tentang hubungan antara balas jasa faktor produksi (pendapatan) dengan pengeluaran atas penggunaan berbagai produk barang dan jasa oleh faktor produksi tersebut

dari aktivitas perdagangan barang dan jasa antar wilayah, baik dengan wilayah lain ataupun dengan luar negeri.

Melalui pendekatan ini dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi (akhir) atau juga untuk tujuan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diketahui besarnya ketergantungan ekonomi wilayah (domestik) terhadap luar negeri dalam bentuk perdagangan internasional (*external transaction*). Selisih antara ekspor dan impor juga disebut sebagai “ekspor neto” .

Sebagaimana PDRB Produksi, dari PDRB Pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat tentang perekonomian wilayah seperti nilai nominal, struktur atau distribusi pengeluaran konsumsi akhir, pertumbuhan “riil”, serta indeks harga implisit. Data yang dimaksud tersedia baik untuk masing-masing komponen PDRB Pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

1.2. PERUBAHAN TAHUN DASAR PDRB

Mengapa Tahun Dasar PDRB Perlu Diubah?

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian global maupun lokal, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, serta semakin meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan beberapa contoh perubahan yang perlu diantisipasi dalam mekanisme pencatatan data statistik nasional.

Satu bentuk implementasi dari *System of National Accounts (SNA)* adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA 2008. Kegiatan ini diawali dengan menyusun kerangka kerja dalam bentuk *Supply and Use Tables (SUT)* Indonesia untuk tahun data 2010. Dari kerangka SUT tersebut diperoleh nilai estimasi PDB dan komponen-komponennya. Selanjutnya nilai PDB maupun komponennya ini dijadikan sebagai acuan (*benchmark*) ketika BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota menyusun PDRB-nya. Untuk itu, guna menjaga konsistensi dengan hasil penghitungan PDB, maka

perubahan tahun dasar PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB.

Apa yang Dimaksud dengan SNA 2008?

SNA 2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi, yang telah sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, cakupan, dan klasifikasi, serta aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro (*account*) seperti PDB/PDRB.

SNA dirancang guna menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya aktivitas produksi, konsumsi, dan aktivitas akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan dan penetapan kebijakan ekonomi. Melalui kerangka SNA, fenomena suatu perekonomian wilayah dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB diantaranya adalah:

- a. Menginformasikan kondisi ekonomi terkini, seperti terjadinya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kualitas PDRB;
- c. Menjadikan PDRB dapat diperbandingkan secara nasional.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Perubahan tahun dasar PDRB antara lain berdampak pada:

- a. Meningkatkan nilai PDRB, yang pada gilirannya berpengaruh pada perubahan kelompok pendapatan (dari wilayah berpendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi), serta pergeseran struktur ekonomi;
- b. Perubahan besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, neraca perdagangan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- c. Perubahan input data untuk keperluan *modeling* dan *forecasting*.

Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Terpilihnya tahun 2010 sebagai tahun dasar didasarkan atas beberapa alasan sbb:

- Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;
- Terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, terutama di bidang informasi, teknologi dan transportasi. Perubahan ini berpengaruh pada pola distribusi dan munculnya beberapa produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar, yang harus dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun⁴;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, sumber data, dan metodologi penghitungan sesuai rekomendasi SNA 2008;
- Tersedianya data dasar untuk meningkatkan kualitas PDRB seperti hasil Sensus Penduduk 2010 dan Indeks Harga Produsen (*Producers Price Index*);
- Tersedianya kerangka SUT Indonesia tahun 2010, yang menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi serta pendapatan yang tercipta dari aktivitas tersebut.

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 diantaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain adalah:

- Konsep dan Cakupan
 - a. Sumber daya hayati (*cultivated biological resources/CBR*). CBR merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari output pertanian dan PMTB. Contoh nilai tegakan padi, kelapa sawit dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum menghasilkan.
 - b. Sistem persenjataan (*military weapon systems/MWS*). MWS merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri peralatan militer dan PMTB seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja, dan peluru kendali.
 - c. Penelitian dan pengembangan (*research and development/RnD*). RnD merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, yang diperlakukan

⁴ SNA1993, para 16.76: "constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing"

sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB seperti *RnD* tentang varietas padi, produk otomotif, dan riset pemasaran.

- d. Eksplorasi dan evaluasi mineral (*mineral exploration and evaluation/MEE*). *MEE* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
- e. Bank Sentral (*Central Bank/CB*). Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut digabungkan dengan aktivitas penyediaan jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.
- f. Komputer software (*computer software and databases/CSD*). *CSD* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan *databases*, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
- g. Produk kekayaan intelektual (*entertainment, literary or artistic originals/ELA*). *ELA* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunannya, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
- h. pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.

- Metodologi

Output jasa intermediasi keuangan. Output industri ini diestimasi dengan metoda FISIM (*Financial intermediation services indirectly measured / FISIM*). FISIM dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan (*deposits*), bunga pinjaman (*loans*), dan suku bunga referensi (*reference*). Metoda ini menggantikan metoda *Imputed Bank Services Charge (IBSC)*.

- Valuasi

Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*Basic Price*). Harga dasar merupakan harga keekonomian suatu barang atau jasa pada tingkat produsen, sebelum ada intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.

- **Klasifikasi**

Klasifikasi yang digunakan adalah Internasional Standard Industrial Classification (ISIC rev.4) dan Central Product Classification (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2009 dan KBKI 2010.

Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga 2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 3. Pembentukan Modal Tetap Bruto 4. Perubahan Inventori 5. Ekspor 6. Impor	1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga 2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT 3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 4. Pembentukan Modal Tetap Bruto 5. Perubahan Inventori 6. Ekspor 7. Impor

2

METODA ESTIMASI DAN SUMBER DATA



2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA (PK-RT)

i. Pendahuluan

Sektor rumahtangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan komponen konsumsi rumahtangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran¹. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen serta penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lainnya.

ii. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga (PK-RT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga untuk tujuan konsumsi. Rumahtangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PK-RT mencakup pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga residen, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis barang dan jasa tersebut diklasifikasikan menurut *Classifications of Individual Consumption by Purpose (COICOP)*, sbb:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan

¹ Untuk Kabupaten/Kota yang mempunyai hasil tambang/industri/perkebunan dan nilai eksportnya sangat tinggi, umumnya nilai konsumsi rumahtangganya relatif lebih rendah

10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun dalam publikasi ini, PK-RT hanya diklasifikasi ke dalam 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Pereengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PK-RT bersumber dari :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional/Daerah (Susenas/Suseda), BPS
- Survei Khusus Konsumsi Rumahtangga Triwulanan (SKKRT), BPS
- Sensus Penduduk 2010, BPS
- Data Sekunder (dari dalam maupun luar BPS)
- Indeks Harga Konsumen (IHK), BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-RT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi perkapita Susenas/Suseda (untuk PK-RT Tahunan)
2. Data poin 1 dikalikan dengan penduduk pertengahan tahun, dikalikan 12 (PKRT Tahunan)
3. Data poin 2 dikelompokkan menjadi 12 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas dikontrol secara tersendiri;
4. Terhadap data poin 3, dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan data sekunder atau data/indikator suplai;
5. Diperoleh nilai PK-RT Tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku) ;
6. Susun Indeks implisit PK-RT berdasarkan IHK Kota (provinsi/kota terdekat);
7. Nilai PK-RT atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara membagi hasil poin 5 dengan poin 6.

Catatan:

Komponen PK-RT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan konsumsi rumahtangga triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SKKRT.

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAHTANGGA (PK-LNPRT)

i Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumahtangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri di dalam perekonomian suatu wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumahtangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga yang ditawarkan di bawah tingkat harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Untuk diketahui, sesuai dengan fungsinya LNP dapat dibedakan atas LNP yang melayani rumahtangga (LNPRT) dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggota atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota yang dimaksud bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/ kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT merupakan nilai output non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT. Nilai output non-pasar diestimasi berdasarkan nilai pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasional. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis dan barang cetakan; pembayaran rekening listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan; biaya

transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas; belanja barang dan jasa lainnya; sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.

- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lain
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

iv. Sumber Data

- a. Survei Khusus Lembaga Nonprofit yang melayani Rumahtangga (SK-LNP), BPS
- b. SK-LNP Triwulanan (SK-LNPT), BPS
- c. Hasil *up-dating* direktori LNPRT, BPS
- d. Indeks Harga Konsumen, BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-LNPRT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi per jenis lembaga dari hasil SK-LNP;
2. Hasil dari poin 1 dikalikan dengan banyaknya lembaga pada pertengahan tahun dari Direktori LNPRT;
3. Terhadap hasil poin 2 dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan indikator kegiatan hasil SK-LNP seperti jumlah tenaga kerja, penerima layanan, berbagai even seperti munas, rakerda, dan penanganan bencana;
4. Diperoleh nilai PK-LNPRT tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku);
5. Susun Indeks implisit PK-LNPRT berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. Nilai PK-LNPRT atas dasar harga Konstan (ADHK) diperoleh dengan membagi hasil poin 4 dengan poin 5.

Catatan :

Komponen PK-LNPRT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi LNPRT triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SK-LNPT.

i. Pendahuluan

Unit pemerintah merupakan unit institusi yang terbentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas teritori suatu wilayah atau negara. Pemerintah juga berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi individu atau kelompok rumah tangga tertentu, pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, serta berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan melalui aktivitas transfer. Dari sudut pandang lain, unit pemerintah terlibat dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah berperan sebagai konsumen maupun produsen barang dan jasa, serta sebagai regulator yang menetapkan kebijakan di bidang fiskal maupun moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah melakukan aktivitas produksi dan investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Nilai PK-P merupakan besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah untuk dikonsumsi oleh pemerintah itu sendiri. Nilai tersebut diestimasi dengan pendekatan pengeluaran, yakni sebesar nilai pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran kompensasi pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, serta nilai output dari unit Bank Indonesia. Nilai ini masih harus dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan melalui unit produksi yang tak terpisahkan dari aktivitas pemerintahan secara keseluruhan. Aktivitas yang dimaksud mencakup aktivitas:

1. Memproduksi barang yang sejenis dengan barang yang diproduksi unit perusahaan seperti publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, dan pembibitan tanaman di kebun percobaan. Aktivitas menghasilkan barang-barang semacam itu bersifat insidentil dan di luar fungsi utama dari unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa, seperti penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam praktek, pemerintah akan memungut biaya, namun umumnya biaya yang dikenakan tidak akan melebihi seluruh biaya yang dikeluarkan

pemerintah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi atau pendapatan jasa.

iii. Cakupan

Sektor pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, pemerintah kabupaten/kota mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

PK-P kabupaten/kota mencakup: a). PK-P desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah kabupaten/kota; b). PK-P kabupaten/kota yang bersangkutan; c). PK-P pusat yang merupakan bagian dari PK-P kabupaten/kota.

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi PK-P kabupaten/kota tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBD Tahunan, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- b. Statistik Keuangan Daerah, BPS
- c. Output Bank Indonesia, Bank Indonesia
- d. Gaji Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- e. Indeks Harga dan Indeks Upah, BPS
- f. Indeks perkembangan pengeluaran pemerintah daerah triwulanan, BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-P kabupaten/kota Tahunan diestimasi dengan menggunakan metoda:

$$\begin{aligned} \text{PK-P atas dasar harga Berlaku} = & \text{Output} - \\ & \text{Penjualan barang dan jasa} + \\ & \text{Social transfer in kind purchased market production} + \\ & \text{Output Bank Indonesia} \end{aligned}$$

Output non pasar dihitung melalui pendekatan biaya operasional, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain.

Catatan :

1. Komponen PK-P Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi pemerintah daerah triwulanan

2. PK-P atas dasar harga Konstan diestimasi dengan men-deflate PK-P atas dasar harga Berlaku dengan menggunakan deflator berikut:

Jenis Belanja	Deflator	Keterangan
Belanja Pegawai	Indeks Upah	Sama dengan Nasional
Belanja Barang	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penyusutan	Indeks Implisit PMTB	
Belanja Bansos	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penerimaan barang dan jasa	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Social Transfer in kind	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Output BI		Neraca Jasa

2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

i Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks PDRB, aktivitas investas yang dimaksud adalah investasi dalam bentuk fisik. Aktivitas investasi akan tercermin melalui komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori (PI). Komponen PMTB terkait dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal, yakni dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan; tumbuhan dan ternak; serta barang modal lainnya.

ii Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer dan barter), serta pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang

dibudidaya (*Cultivated Biological Resources/ CBR*). Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, serta sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Dalam hal pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal karena digunakan dalam proses produksi secara normal selama periode tertentu.

iii Cakupan

PMTB mencakup :

1. Penambahan dikurangi pengurangan barang modal baik baru maupun bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan dan konstruksi lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*);
1. Biaya alih kepemilikan atas aset non-finansial yang tidak diproduksi seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
1. Perbaikan besar barang modal, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi.

iv Sumber Data

- a. Output industri konstruksi, BPS
- b. Nilai impor 2 digit HS, BPS
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang, BPS
- d. Laporan Keuangan Perusahaan, Data Sekunder dari luar BPS
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang, BPS
- f. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), BPS
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas), BPS
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum, BPS
- i. Publikasi Statistik Konstruksi, BPS

- j. Data Eksplorasi Mineral, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian.

v **Metoda estimasi**

Komponen PMTB diestimasi dengan menggunakan metoda langsung ataupun metoda tidak langsung tergantung ketersediaan data di masing-masing daerah.

✓ **Metoda Langsung:**

PMTB atas dasar harga Berlaku (Domestik) = Barang Modal Domestik + TTM + Pajak atas Produk (PPN) + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Berlaku (Impor) = Barang Modal Impor + TTM + Bea Impor + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara *men-deflate* PMTB atas dasar harga Berlaku dengan IHPB sbb:

$$PMTB_{ADHK} = \frac{PMTB_{ADHB}}{IHPB}$$

IHPB yang digunakan adalah IHPB Nasional (2010=100) sesuai jenis barang modal.

✓ **Metoda Tidak Langsung:**

Pendekatan Supply : PMTB atas dasar harga Berlaku = Total Supply Barang x Rasio PMTB

Pendekatan Ekstrapolasi : PMTB atas dasar harga Konstan (t) = PMTB atas dasar harga (t-1) x Indeks Produksi (t)

2.5 **PERUBAHAN INVENTORI (PI)**

i **Pendahuluan**

Dalam suatu perekonomian, inventori atau persediaan merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu proses produksi, di samping

tenaga kerja dan barang modal. Komponen tersebut menjadi bagian dari pembentukan modal bruto atau investasi fisik, yang terjadi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Komponen inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong. Ketersediaan data tentang perubahan inventori pada suatu periode akuntansi menjadi penting guna memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang lainnya, yang mempunyai nilai ekonomi atau manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh produsen.

Nilai perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori di akhir periode dengan nilai inventori pada awal periode (akuntansi). Perubahan inventori menjelaskan perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (bertanda positif) ataupun pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan dari proses produksi sehingga perlu dicadangkan, baik dalam bentuk bahan baku ataupun bahan penolong. Faktor ketidakpastian yang disebabkan oleh pengaruh dari faktor eksternal juga menjadi pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih disebabkan oleh unsur spekulasi, dengan harapan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Sedangkan bagi pemerintah, pencadangan komoditas yang strategis dimaksudkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, tepung terigu, minyak goreng dan gula pasir perlu dicadangkan oleh pemerintah. Namun bagi rumah tangga, pengadaan inventori barang lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsi.

iii Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang sbb :

1. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan,

- perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
2. Inventori menurut jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), mencakup semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
 3. Barang jadi, mencakup barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
 4. Barang setengah jadi, yang mencakup barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
 5. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang untuk tujuan dijual;
 6. Ternak untuk tujuan dipotong;
 7. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau digunakan sebagai bahan bakar atau persediaan; serta
 8. Persediaan pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi komponen perubahan inventori adalah :

1. Laporan keuangan perusahaan hasil kegiatan survei atau *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
2. Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD, Data Sekunder dari luar BPS
3. Data komoditas pertambangan, Statistik Pertambangan dan Penggalan BPS;
4. Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang, BPS;
5. Data komoditas perkebunan;
6. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih;
7. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih;
8. Data persediaan beras, Bulog; data semen, Asosiasi Semen Indonesia; data gula, Dewan Gula Indonesia ; dan data ternak, Ditjenk Kementan.

v Metoda Estimasi

Komponen Perubahan Inventori (PI) diestimasi dengan menggunakan metoda revaluasi atau metoda deflasi, tergantung jenis komoditasnya.

a. Metoda Revaluasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan pertambangan.

$$\text{PI atas dasar harga Berlaku} = \frac{\text{Volume inventori (t)} - \text{Volume inventori (t-1)}}{\text{per unit}} \times \text{Harga}$$

$$\text{PI atas dasar harga Konstan} = \text{PI atas dasar harga Berlaku} / \text{IHPB}$$

b. Metoda Deflasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas industri pengolahan dan komoditas lainnya.

$$\text{PI atas dasar harga Konstan} = \frac{\text{Inventori (t) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t)} - \text{Inventori (t-1) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t-1)}}{1}$$

$$\text{PI atas dasar harga Berlaku} = \text{PI atas dasar harga Konstan} \times \text{IHPB rata-rata (t)}$$

2.6 EKSPOR - IMPOR

i Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam barang dan jasa yang diproduksi maupun disparitas harganya menjadi faktor utama munculnya aktivitas tersebut. Wilayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-nya sendiri berusaha untuk mendatangkan dari luar wilayah atau bahkan dari luar negeri. Di sisi lain, wilayah yang memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhan domestik-nya, terdorong untuk memperluas pasar ke luar wilayah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas berbagai barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus dan distribusi barang dan jasa. Kondisi ini semakin mendorong aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah.

ii Konsep dan definisi

Ekspor-impor didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/ pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antar residen wilayah tersebut dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri).

iii Cakupan

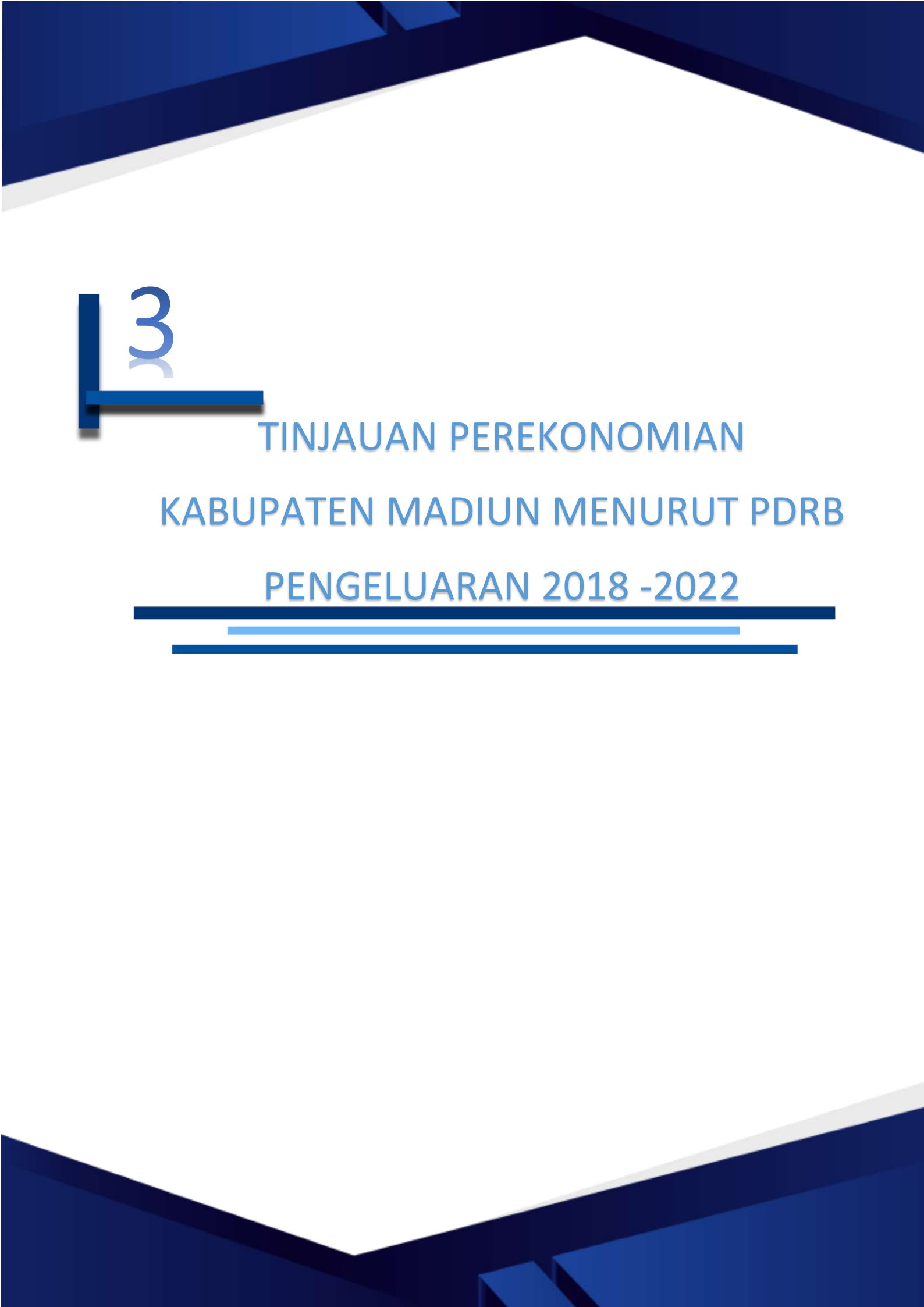
Ekspor-Import ke dan dari suatu wilayah kabupaten/kota terdiri dari:

- a. Ekspor ke luar provinsi/kabupaten/kota
- b. Import dari luar provinsi/kabupaten/kota.

Selisih antara ekspor dan impor didefinisikan sebagai Net Ekspor.

iv Sumber Data

Nilai ekspor-impor wilayah kabupaten/kota didasarkan pada penghitungan Net Ekspor. Namun sering kali untuk mengestimasi tidak ada data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Kondisi inilah yang menyebabkan Net Ekspor kabupaten/kota diperlakukan sebagai item penyeimbang (*residual*), yakni perbedaan antara PDRB menurut pengeluaran dengan PDRB menurut lapangan usaha. Selanjutnya dilakukan pemisahan Net Ekspor menjadi ekspor dan impor dengan menggunakan metoda tidak langsung.



3

TINJAUAN PEREKONOMIAN
KABUPATEN MADIUN MENURUT PDRB
PENGELUARAN 2018 -2022

3.1. PERKEMBANGAN PDRB PENGELUARAN

Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 2015, PDRB diestimasi dengan menggunakan tahun dasar yang baru, tahun 2010 (2010=100) menggantikan tahun dasar lama, tahun 2000 (2000=100). Penyusunan PDRB dengan tahun dasar baru juga disertai dengan upaya untuk mengimplementasikan *System of National Accounts* (SNA) yang baru, SNA 2008. Ke dua hal tersebut tentu berdampak pada besaran maupun struktur PDRB serta indikator ekonomi yang diturunkan dari data PDB/PDRB tersebut.

Secara total, PDRB Kabupaten Madiun atas dasar harga (atas dasar harga) Berlaku di tahun 2021 meningkat sebesar 4,27 persen, yakni dari 18.917 miliar rupiah (2010=100) menjadi 19.760 miliar rupiah (2010=100). Jika dinilai atas dasar harga (atas dasar harga) Konstan 2010, maka peningkatan ini jauh lebih besar, yakni dari 12.940 miliar rupiah (2010=100) menjadi 13.372 miliar rupiah (2010=100), atau meningkat sebesar 3,24 persen.

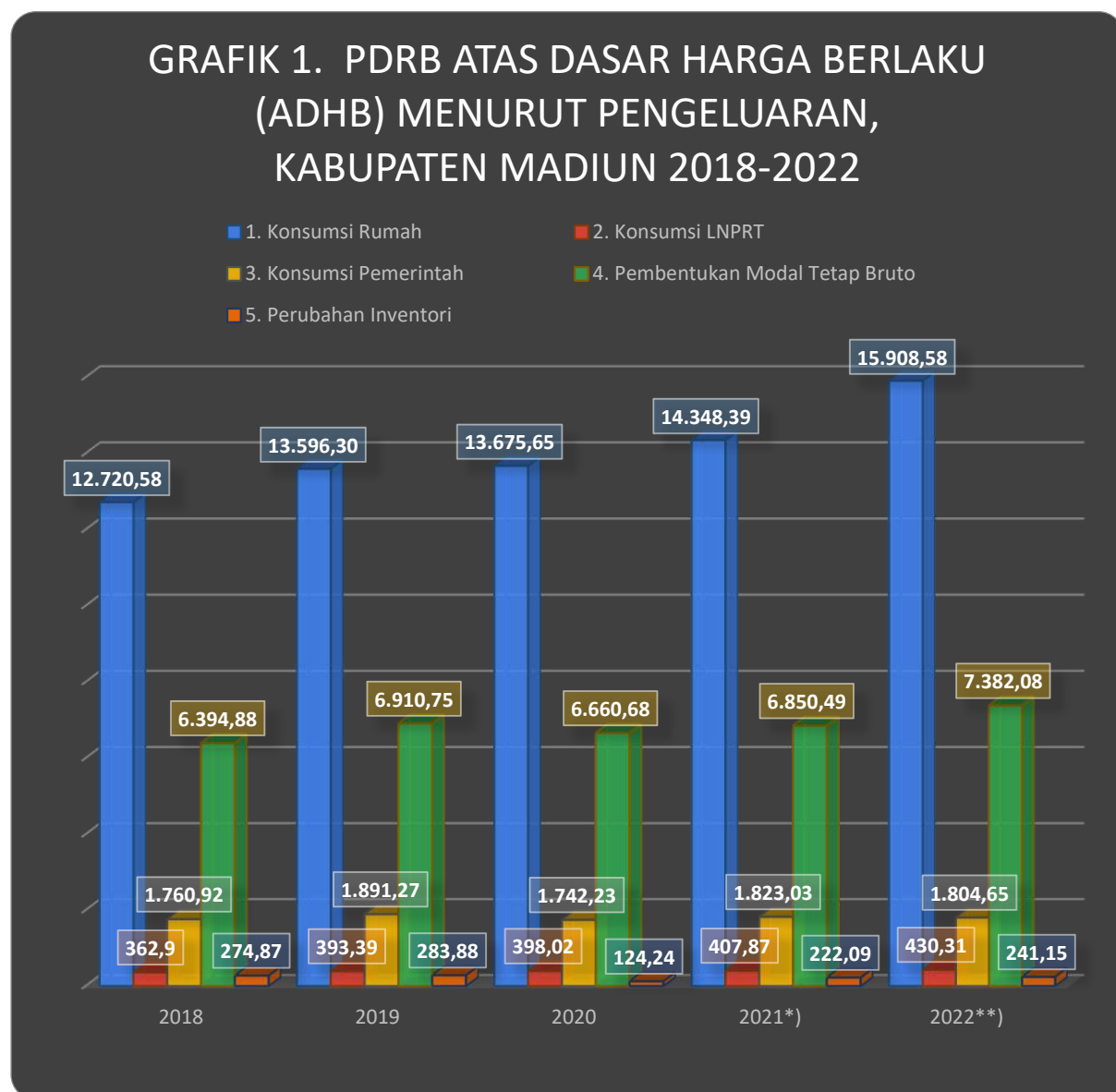
**Tabel 1. PDRB atas dasar harga Berlaku (ADHB) Menurut Pengeluaran, Kabupaten Madiun
2018 - 2022**

Komponen Pengeluaran	(Miliar Rp)				
	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah	12.720,58	13.596,30	13.675,65	14.348,39	15.908,58
2. Konsumsi LNPRT	362,90	393,39	398,02	407,87	430,31
3. Konsumsi Pemerintah	1.760,92	1.891,27	1.742,23	1.823,03	1.804,65
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	6.394,88	6.910,75	6.660,68	6.850,49	7.382,08
5. Perubahan Inventori	274,87	283,88	124,24	222,09	241,15
6. Ekspor Neto Barang dan Jasa	-3.878,06	-4.144,03	-3.434,25	-3.627,46	-3.887,02
PDRB	17.636,10	18.931,55	19.166,56	20.024,41	21.879,38

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Pada periode tahun 2018 - 2022, PDRB Kabupaten Madiun atas dasar harga Berlaku meningkat cukup signifikan, yakni masing-masing sebesar 17.636 miliar rupiah (2018); 18.932 miliar rupiah (2019); 19.166 miliar rupiah (2020); 20.024 miliar rupiah (2021) dan sebesar 21.879 miliar rupiah (2022). Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran. Peningkatan PDRB menurut komponen pengeluaran Kabupaten Madiun pada periode 2018 - 2022 dapat dilihat dari tabel 1 dan grafik 1.



Sumber : BPS Kabupaten Madiun

Catatan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga Konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang divalusi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Nilai PDB atas dasar harga Konstan 2010 Kabupaten Madiun pada periode 2018 – 2022 dapat dilihat dari tabel 2 dan grafik 2 berikut :

Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Madiun 2018 – 2022

Komponen Pengeluaran	(Miliar Rp)				
	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	8.881,95	9.269,48	9.156,26	9.479,18	10.052,80
2. Konsumsi LNPRT	237,69	252,57	254,05	256,33	267,42
3. Konsumsi Pemerintah	1.091,47	1.163,05	1.119,74	1.126,72	1.167,73
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4.206,85	4.429,19	4.224,14	4.265,49	4.360,62
5. Perubahan Inventori	153,52	156,22	67,06	116,53	116,02
6. Ekspor Neto Barang dan Jasa	-2.086,47	-2.108,66	-1.675,14	-1.661,57	-1.797,96
PDRB	12.485,01	13.161,84	13.146,12	13.582,73	14.169,62

Sumber : BPS Kabupaten Madiun

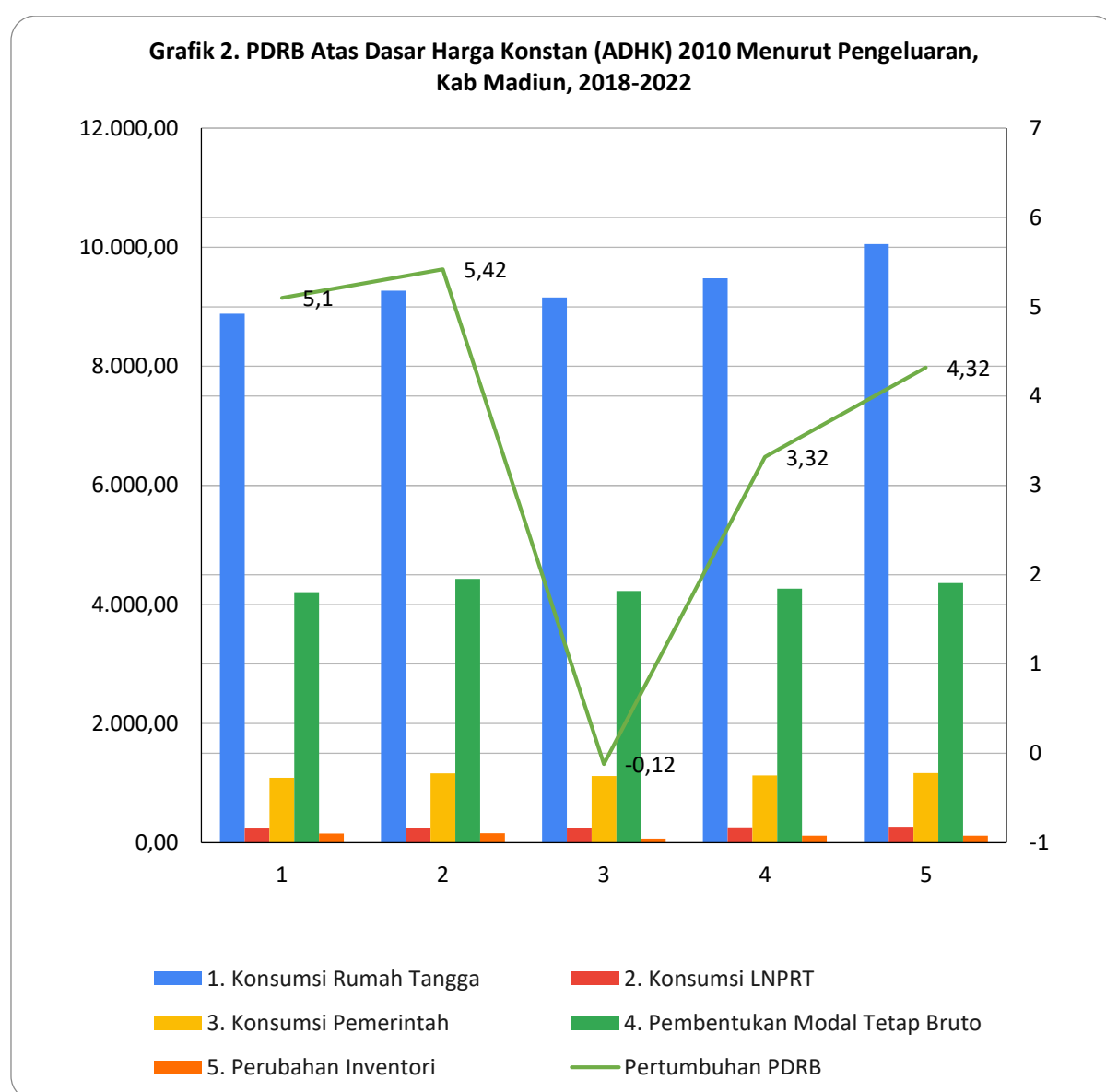
Catatan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

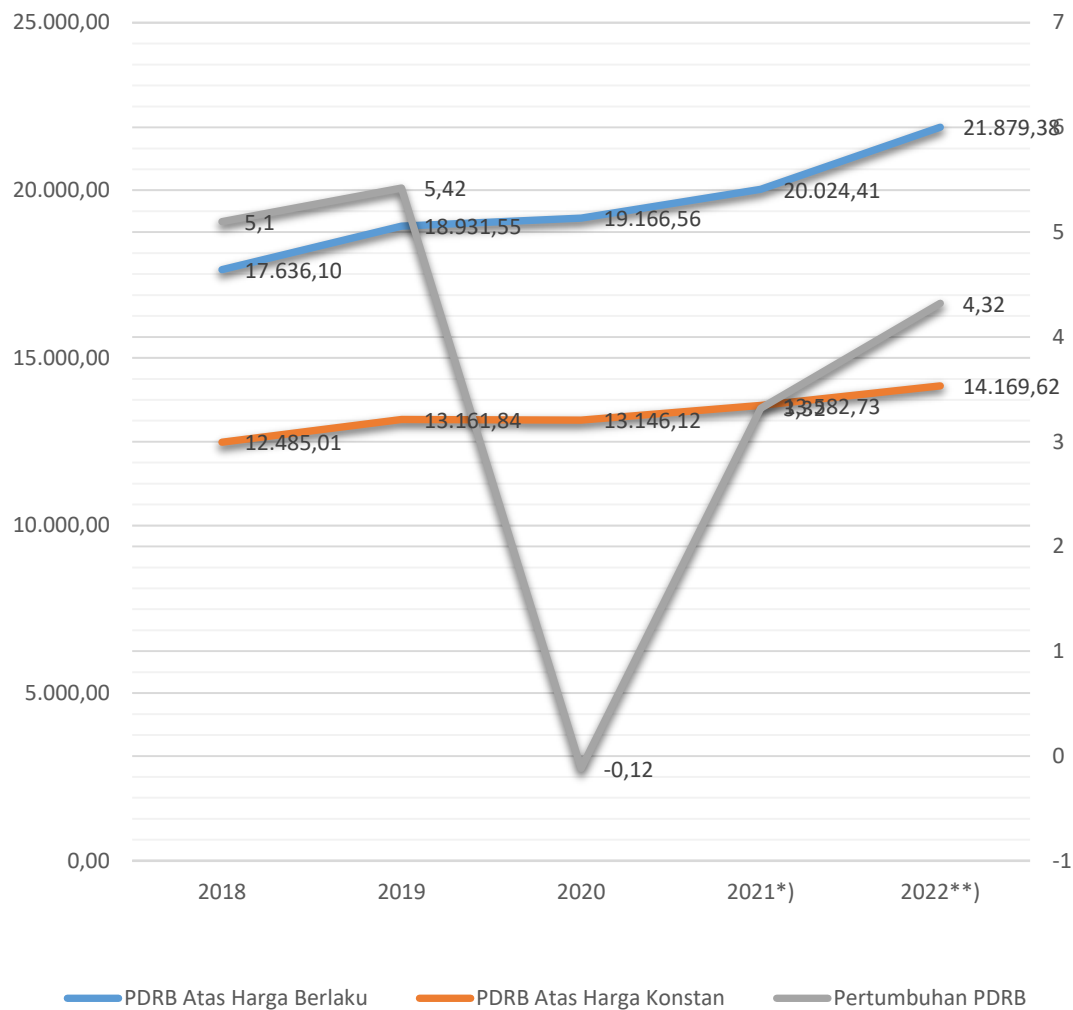
Dari tabel 2, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga Konstan di Kabupaten Madiun selama periode 2018 hingga 2019 meningkat, yakni sebesar 12.485 miliar rupiah (2018) dan 13.162 miliar rupiah (2019). Berikutnya mengalami penurunan menjadi 13.146 miliar rupiah (2020), diakibatkan mewabahnya COVID-19 sehingga menghambat berbagai aktivitas

ekonomi dan kegiatan sehari-hari. Kemudian mengalami peningkatan lagi menjadi 13.582 miliar rupiah (2021) dan menjadi 14,170 miliar rupiah (2022) karena perekonomian sudah mulai pulih dan dicabutnya PPKM.

Sedangkan dari grafik 2, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Madiun berfluktuasi. Pada tahun 2018 pertumbuhan sebesar 5,10 persen dan menjadi 5,42 persen pada tahun 2019. Selanjutnya tahun 2020 mengalami perlambatan relatif dalam sebesar minus 0,12 persen dan tahun 2021 perekonomian mulai pulih, sehingga pertumbuhan mengalami percepatan lagi menjadi 3,32 persen. Kemudian tahun 2022 mengalami pertumbuhan yang signifikan sebesar 4,32 persen.



Grafik 3. Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Madiun, 2018-2022



Sumber : BPS Kabupaten Madiun

Catatan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Dari grafik 3, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga Berlaku selalu lebih tinggi dari PDRB atas dasar harga Konstan. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan harga yang cenderung meningkat. Sedangkan pada PDB atas dasar harga Konstan, pengaruh dari harga tersebut telah ditiadakan. Sama halnya PDRB atas dasar harga Berlaku, sebagian besar pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga Konstan juga menunjukkan peningkatan.

Tabel 3. Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Madiun, 2018-2022

(%)

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	72,13	71,82	71,35	71,65	72,71
2. Konsumsi LNPRRT	2,06	2,08	2,08	2,04	1,97
3. Konsumsi Pemerintah	9,98	9,99	9,09	9,10	8,25
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	36,26	36,50	34,75	34,21	33,74
5. Perubahan Inventori	1,56	1,50	0,65	1,11	1,10
6. Ekspor Neto Barang dan Jasa	- 21,99	-21,89	-17,92	-18,12	-17,77
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), ekspor netto (E) atau ekspor minus impor barang dan jasa.

Dari tabel 3 terlihat bahwa selama periode 2018-2021, PDRB Kabupaten Madiun, didominasi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT) yaitu masing-masing sebesar 72,13 persen (2018); 71,82 persen (2019); 71,35 persen (2020); 71,65 persen (2021); dan 72,71 persen (2022). Selain itu, pengeluaran untuk aktivitas pembentukan modal (PMTB) juga mempunyai kontribusi yang relatif besar selama lima tahun terakhir, yakni mulai sekitar 36,26 persen di Tahun 2018 dan menjadi sekitar 33,74 persen Tahun 2022. Komponen Ekspor Neto berkontribusi sekitar minus 21,99 persen hingga menjadi 17,77 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian kebutuhan domestik masih harus dipenuhi oleh produk yang berasal dari luar wilayah atau bahkan luar negeri (impor).

Grafik 4. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Madiun, 2018 - 2022



Sumber : BPS Kabupaten Madiun

Catatan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Kontribusi Komponen Konsumsi Pemerintah (PK-P) berada pada rentang 9,99 – 8,25 persen. Hal tersebut menunjukkan peran pemerintah dalam menyerap PDRB tidak terlalu besar. Di sisi lain, pada tahun 2018-2022 perdagangan dengan luar wilayah yang direpresentasi oleh Komponen Ekspor Neto yang menunjukkan angkanya minus. Kecenderungan pada periode itu menggambarkan perdagangan antar wilayah menunjukkan nilai ekspor yang lebih rendah dari nilai impor (dalam kondisi “defisit” atau merugi).

Agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Indikator ekonomi ini menggambarkan kinerja

pembangunan ekonomi suatu wilayah. Sebagaimana terlihat dari tabel 4, selama periode tahun 2018 - 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun berfluktuasi. Pada tahun 2018-2019 pertumbuhan mengalami percepatan dari sebesar 5,10 persen (2018) menjadi 5,42 persen tahun 2019. Kemudian tahun 2020 mengalami perlambatan menjadi minus 0,12 persen akibat mewabahnya Virus COVID-19. Mulai tahun 2021 kondisi perekonomian mulai terjadi pemulihan dan pertumbuhan mengalami percepatan menjadi sebesar 3,32 persen dan tahun 2022 menjadi sebesar 4,32 persen.

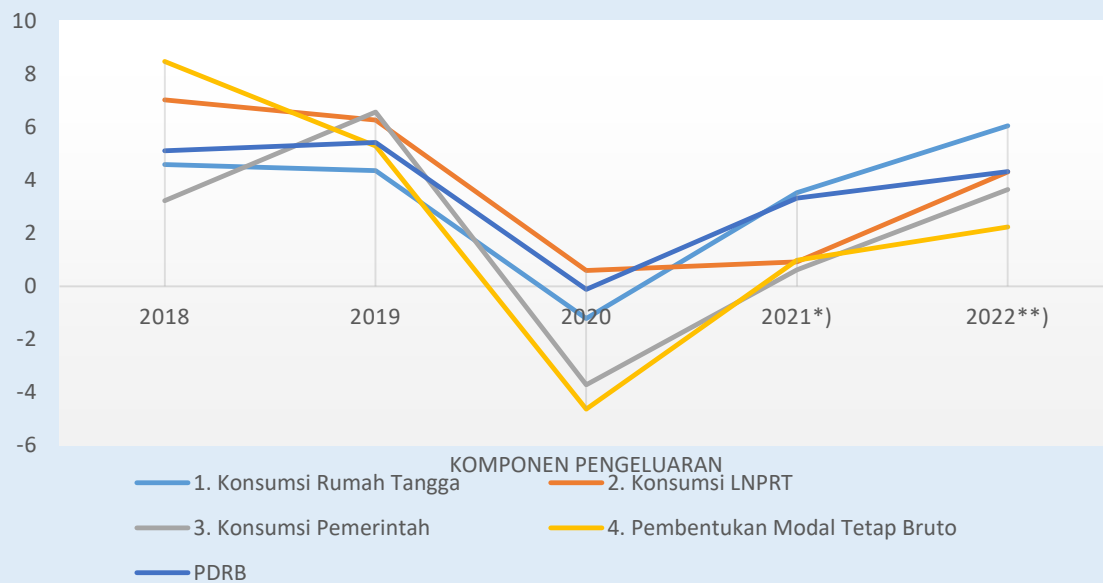
Tabel 4. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Madiun, 2018-2022

Komponen Pengeluaran	2018 2019 2020 2021*) 2022**)				
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	4,59	4,36	-1,22	3,53	6,05
2. Konsumsi LNPR	7,02	6,26	0,59	0,92	4,31
3. Konsumsi Pemerintah	3,22	6,56	-3,72	0,62	3,64
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	8,47	5,29	-4,63	0,98	2,23
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor Neto Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
PDRB	5,10	5,42	-0,12	3,32	4,32

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Grafik 5. Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Madiun, 2018-2022



Sumber : BPS Kabupaten Madiun

Catatan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Indeks implisit¹ PDRB pengeluaran menggambarkan besarnya perubahan harga yang terjadi dari sisi konsumen (rumahtangga, LNPR, pemerintah, dan perusahaan) akhir barang dan jasa, baik yang digunakan untuk keperluan konsumsi, investasi maupun ekspor/impor. Dari 37table 5 akan terlihat tingkat kenaikan harga selama periode tahun 2018-2022, baik perubahan harga yang terjadi secara umum maupun pada masing-masing komponen.

¹ Indeks perkembangan

Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Madiun, 2018-2022

(%)

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	143,22	146,68	149,36	151,37	158,25
2. Konsumsi LNPR	152,68	155,76	156,67	159,09	160,91
3. Konsumsi Pemerintah	161,33	162,61	155,59	161,80	154,54
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	152,01	156,03	157,68	160,60	169,29
5. Perubahan Inventori	179,04	181,72	185,27	190,59	202,60
6. Ekspor Neto Barang dan Jasa	185,87	196,52	205,01	218,31	216,19
PDRB	141,26	143,84	145,80	147,43	154,41

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 6. Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Madiun 2018-2022

(%)

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	3,28	3,10	-0,86	2,46	4,22
2. Konsumsi LNPR	0,13	0,12	0,01	0,02	0,08
3. Konsumsi Pemerintah	0,29	0,57	-0,33	0,05	0,30
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	2,76	1,78	-1,56	0,31	0,70
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor Neto Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
PDRB	5,10	5,42	-0,12	3,32	4,32

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

3.2. PERKEMBANGAN KOMPONEN PDRB PENGELUARAN

Perubahan struktur perekonomian suatu wilayah sebagai akibat dari upaya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada periode tertentu, tidak terlepas dari perilaku masing-masing komponen pengguna akhir. Setiap komponen mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuan akhir penggunaan barang dan jasa. Data empiris menunjukkan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia pada periode tertentu digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir oleh rumah tangga, LNPRT dan pemerintah, sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori. Berikut perilaku masing-masing komponen PDRB pengeluaran Kabupaten Madiun untuk periode 2018-2022.

3.2.1. Konsumsi Akhir Rumah tangga

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kabupaten Madiun ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Madiun maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumah tangga.

Dalam suatu perekonomian, fungsi utama dari institusi rumah tangga adalah sebagai konsumen akhir (*final consumer*) atas barang dan jasa yang tersedia, termasuk konsumsi oleh rumah tangga khusus (seperti penjara, asrama dan lain-lain). Selanjutnya, berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi tersebut akan diklasifikasikan menurut 7 (tujuh) kelompok COICOP (*Classification of Individual Consumption by Purpose*), yaitu kelompok makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; angkutan dan komunikasi; restoran dan hotel; serta kelompok barang dan jasa lainnya.

Data diatas menunjukkan bahwa pada periode tahun 2018-2022 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami (peningkatan/penurunan) signifikan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah

penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumahtangga. Pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Selama periode 2018-2022 proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap total PDRB fluktuatif, yaitu 72,13 persen (2018); 71,82 persen (2019); 71,35 persen (2020); 71,65 persen (2021) dan 72,71 persen (2022). Posisi tertinggi terjadi pada tahun 2022 dan terendah pada tahun 2020. Hal ini karena pada tahun 2020 terjadi wabah Covid-19, sehingga pengeluaran konsumsi masyarakat mengalami penurunan. Sebaliknya di tahun 2022 Covid sudah mereda dan PPKM sudah dicabut, sehingga konsumsi masyarakat meningkat dan produk lebih digunakan untuk investasi.

Tabel 7. Perkembangan Komponen Konsumsi Rumahtangga Kabupaten Madiun, 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (Miliar Rp)	12.720,58	13.596,30	13.675,65	14.348,39	15.908,22
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	8.881,95	9.269,48	9.156,26	9.479,18	10.052,80
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	72,13	71,82	71,35	71,65	72,71
Rata-rata konsumsi Per Kapita (Ribuan Rp)					
a. ADHB	18.668,47	19.910,58	18.416,59	19.127,54	20.996,38
b. ADHK 2010	13.034,97	13.574,34	12.330,47	12.636,50	13.268,13
Pertumbuhan²					
a. Total konsumsi RT (%)	4,12	0,49	2,48	-3,13	6,05
b. Perkapita (%)	4,11	4,14	-9,16	2,48	5,00
Jumlah penduduk (orang)	681.394	682.868	742.572	750.143	757.665

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Secara rata-rata, konsumsi per rumahtangga dari tahun ke tahun mengalami berfluktuasi, baik menurut atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2018, setiap rumahtangga di Kabupaten Madiun menghabiskan dana sekitar 62.992,83 ribu rupiah setahun untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Pengeluaran

² Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK 2010)

tersebut meningkat menjadi 64.828,25 ribu rupiah (2019); 67.649,64 ribu rupiah (2020); 66.412,98 ribu rupiah (2021) dan 71.092,79 ribu rupiah (2022).

Di sisi lain, peningkatan rata-rata konsumsi per kapita cenderung berfluktuasi selama lima tahun terakhir searah dengan kenaikan jumlah penduduk. Pertumbuhan rata-rata konsumsi per kapita menunjukkan berfluktuasi, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Kondisi ini menunjukkan rata-rata konsumsi setiap penduduk meningkat, baik secara kuantitas (volume) maupun secara nilai (termasuk peningkatan kualitas). Pertumbuhan per kapita secara “riil” berada pada kisaran minus 9 sampai dengan 4 persen.

Pada tahun 2018 pertumbuhan komponen konsumsi rumah tangga sebesar 4,35 persen. Kemudian berturut-turut sebesar 4,36 persen (2019); turun sebesar minus 1,22persen (2020); tahun 2021 naik menjadi 3,53 persen dan naik lagi menjadi 6,05 persen (2022). Sementara itu rata-rata pertumbuhan konsumsi per kapita pada masing-masing tahun adalah 4,11 persen (2018); 4,14 persen (2019); dan turun sebesar minus 9,16 persen pada tahun 2020. Namun dua tahun berikutnya mengalami kenaikan sebesar 2,48 persen (2021) dan 5,00 persen (2022).

3.2.2. Konsumsi Akhir LNPRT

Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) adalah salah satu unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Dalam kegiatannya, LNPRT merupakan mitra pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan lingkungan hidup.

Tabel 8. Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT Kabupaten Madiun, 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (Miliar Rp)	362,90	393,39	398,02	407,87	430,31
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	237,69	252,57	254,05	256,38	267,42
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	2,06	2,08	2,08	2,04	1,97

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Total pengeluaran konsumsi LNPRT dalam kurun waktu tahun 2018-2022 mengalami peningkatan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pada tahun 2018 konsumsi LNPRT sekitar 363 miliar rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya yaitu 393 miliar rupiah (2019); 398 miliar rupiah (2020); 408 miliar rupiah (2021) dan 430 miliar rupiah (2022). Pertumbuhan pengeluaran konsumsi LNPRT Tahun Dasar 2010 berfluktuasi. Pada tahun 2018 merupakan pertumbuhan tertinggi sebesar 7,02 persen karena adanya persiapan Pemilu 2019 ; dan 6,26 persen (2019) karena adanya Pemilu. Tahun 2020 angkanya turun menjadi sebesar 0,59 persen dampak dari adanya wabah Covid 19. Namun di tahun 2021 angkanya mulai naik menjadi 1,51 persen dan tahun 2022 naik lagi menjadi 5,26 persen.

3.2.3. Konsumsi Akhir Pemerintah

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah a) *Scarcity*, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah. b) *Excludable consumption*, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga). c) *Rivalrous competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa individu adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas negeri.

Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri a) *Non rivalry*, yaitu pengeluaran satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. b) *Non excludable*, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa kolektif adalah jasa pertahanan yang dilakukan TNI dan keamanan yang dilakukan kepolisian.

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah berfluktuasi, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2018 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku adalah sebesar 1.760,92 miliar rupiah. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya sebesar 1.891,27 miliar rupiah (2019); 1.742,23 miliar rupiah (2020); 1.823,03 miliar rupiah (2021) dan 1.804,65 miliar rupiah (2022). Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan dan berfluktuasi pada masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi fluktuasi pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Jika dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB berfluktuasi, dari 9,98 persen (tahun 2018) sampai menjadi 9,99 persen (2019). Kemudian turun di tahun 2020 mencapai 9,09 persen; tahun 2021 mengalami sedikit kenaikan menjadi 9,10 persen dan turun menjadi 8,25 persen. Menurunnya pengeluaran pemerintah karena adanya pengurangan jumlah pegawai berkurang karena pensiun dan pegawai baru lebih sedikit.

Tabel 9. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Madiun, 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (Miliar Rp)	1.760,92	1.891,27	1.742,23	1.823,03	1.804,65
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	1.091,47	1.163,05	1.119,74	1.126,72	1.167,73
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	9,98	9,99	9,09	9,10	8,25
Konsumsi Pemerintah Per Kapita (000 Rp)					
a. ADHB	2.584,28	2.769,59	2.346,21	2.430,24	2.381,85
b. ADHK 2010	1.601,82	1.703,18	1.507,93	1.502,01	1.541,22
Konsumsi Pemerintah per pegawai pemerintah (Juta Rp)					
a. ADHB	214.327,61	232.085,79	217.208,11	244.144,59	257.806,59
b. ADHK 2010	132.847,30	142.723,05	139.601,58	150.893,52	166.818,29
Pertumbuhan⁷ (%)					
a. Total konsumsi pemerintah	2,25	6,56	-3,72	0,62	3,64
b. Konsumsi perkapita	2,03	6,33	-11,46	-0,39	2,61
c. Konsumsi per pegawai pemerintah	7,52	7,43	-2,19	8,09	10,55
Jumlah Pegawai Pemerintah³	8.216	8.149	8.021	7.467	7.000
Jumlah penduduk (org)	681.394	682.868	742.572	750.143	757.665

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan jasa layanan pada publik atau masyarakat dalam bentuk jasa kolektif maupun individual. Dalam praktek, pengeluaran pemerintah ini selalu dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik), meskipun tidak seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total berfluktuasi, hal ini diikuti oleh rata-rata konsumsi pemerintah per kapita. Pada tahun 2018 konsumsi pemerintah per kapita

⁷ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK 2010)

³ Tidak termasuk polisi dan militer

atas dasar harga berlaku sebesar 2.584,28 ribu rupiah dan terus meningkat yaitu sebesar 2.769,59 ribu rupiah (2018); menurun menjadi 2.346,21 ribu rupiah (2020); meningkat kembali menjadi 244.144,59 ribu rupiah pada tahun 2021 dan 257.806,59 ribu rupiah pada tahun 2022.

Demikian juga rata-rata konsumsi pemerintah per kapita atas dasar harga konstan 2010 angkanya berfluktuasi. Pada tahun 2018 hingga 2019 meningkat, 2 (dua) tahun berikutnya mengalami penurunan dan ditahun 2022 meningkat lagi. Masing-masing senilai 1.601,82 ribu rupiah (2018); 1.703,18 ribu rupiah (2019); 1.507,93 ribu rupiah (2020); dan 1.502,01 ribu rupiah (2021); dan 1.541,22 ribu rupiah (2022). Penurunan ini disebabkan adanya wabah COVID-19 yang menyebabkan pemerintah melakukan penghematan. Sedangkan kenaikan terjadi karena wabah Covid sudah mereda dan PPKM sudah dicabut, sehingga aktivitas masyarakat sudah normal kembali.

Rata-rata konsumsi per pegawai pemerintah menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif. Pada tahun 2018 konsumsi pemerintah per pegawai pemerintah sebesar 214.327,61 ribu rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya masing-masing 232.085,79 ribu rupiah (2019); 217.208,11 ribu rupiah (2020), 244.144,59 ribu rupiah (2021) dan 257.806,59 ribu rupiah (2022).

Pada tingkat harga konstan 2010 indikator pemerataan menurut pegawai ini juga menunjukkan fluktuasi dari waktu ke waktu. Persentase kenaikan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2022, yaitu sebesar 10,55 persen akibat pengeluaran pemerintah yang masih relatif besar walaupun jumlah pegawai sedikit (berkurang).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukan peningkatan (baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010), sejalan dengan jumlah pegawai pemerintah yang mengalami penurunan. Selama periode 5 (lima) tahun terakhir (2018-2022) jumlah pegawai pemerintah terus mengalami penurunan dengan jumlah pada masing-masing tahun sebesar 8.216 orang (2018) ; 8.149 orang (2019); 8.021 orang (2020); 7.467 orang (2021) dan di tahun 2022 menurun lagi jumlahnya menjadi 7.000 orang.

Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara “riil” berfluktuasi, baik secara keseluruhan maupun rata-rata (per penduduk maupun per pegawai pemerintah). Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas

pengeluaran sumber daya finansial oleh pemerintah. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 karena adanya Pemilu, yaitu sebesar 6,56 persen dan merupakan pertumbuhan tertinggi selama 5 (lima) tahun terakhir. Demikian juga untuk angka tertinggi konsumsi per kapita 6,33 persen dan konsumsi per pegawai pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 7,43 persen.

3.2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)⁴. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Secara keseluruhan pertumbuhan PMTB berfluktuasi dari 8,47 persen (2018) melambat menjadi 3,23 persen (2022). Sementara di tahun lainnya masing-masing 5,29 persen (2019); minus 4,63 persen (2020) dan minus 3,70 persen karena adanya wabah Covid 19; dan kembali mengalami percepatan 3,23 persen (2022), karena Covid sudah terkendali. Pertumbuhan PMTB tertinggi terjadi pada tahun 2018, hal ini disebabkan oleh adanya pembangunan jalan TOL, gedung kantor, jalan dan lainnya.

⁴ Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

Tabel 10. Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Madiun, 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (Miliar Rp)	6.394,88	6.910,75	6.660,68	6.859,42	6.859,42
b. ADHK2010 (Miliar Rp)	4.206,85	4.429,19	4.220,60	4.274,18	4.274,18
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	36,26	36,50	35,35	34,71	34,71

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

3.2.5. Perubahan Inventori

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk **“persediaan”** berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Tabel 11. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Madiun, 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Perubahan Inventori					
a. ADHB (Miliar Rp)	274,87	156,22	67,06	116,53	119,02
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	153,52	283,88	124,24	222,09	241,14
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	1,56	1,50	0,65	1,11	1,10

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih jauh sebagaimana dilakukan pada komponen pengeluaran lainnya.

Pada tahun 2018 perubahan inventori atas dasar harga berlaku sebesar 274,87 miliar rupiah. Kemudian pada tahun berikutnya meningkat sebesar 283,88 miliar rupiah tahun 2019; mengalami penurunan yang cukup tajam tahun 2020 sebesar 124,24 miliar rupiah karena adanya Covid 19. Kemudian meningkat kembali menjadi 222,09 miliar rupiah di tahun 2021 dan menjadi 241,14 miliar rupiah pada tahun 2022, karena Covid sdh mereda dan pencabutan PPKM.

Sementara itu, proporsi perubahan inventori terhadap total PDRB di Kabupaten Madiun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 proporsi perubahan inventori adalah 1,56 persen, selanjutnya 1,50 persen (2019); 0,65 persen (2020), 1,11 persen (2021) dan 1,10 persen (2022).

3.2.6. Ekspor Neto Barang dan Jasa

Ekspor Neto adalah nilai barang dan jasa yang diekspor ke wilayah lain dikurangi nilai barang dan jasa yang diimpor dari wilayah lain. Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi Kabupaten Madiun, tetapi dikonsumsi oleh pihak yang berdomisili di wilayah lain, baik itu kabupaten lain di dalam satu propinsi, propinsi lain, maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor

pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Kabupaten Madiun. Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangi nilai PDRB (E) dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongan-nya bisa berbeda dengan ekspor. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Kabupaten Madiun di luar domestik, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa). Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor barang dan jasa dapat menunjukkan seberapa besar ketergantungan Kabupaten Madiun terhadap ekonomi atau produk wilayah lain, baik wilayah kabupaten/kota lain dalam satu propinsi, propinsi lain, maupun luar negeri.

Tabel 12. Perkembangan Ekspor Neto Barang dan Jasa Kabupaten Madiun, 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Ekspor Neto Barang dan Jasa					
c. ADHB (Miliar Rp)	-3.878,06	-4.144,03	-3.434,25	-3.627,46	-3.887,02
d. ADHK 2010 (Miliar Rp)	-2.086,47	-2.108,66	-1.675,14	-1.661,57	-1.797,96
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	-21,99	-21,89	-17,92	-18,12	-17,77

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

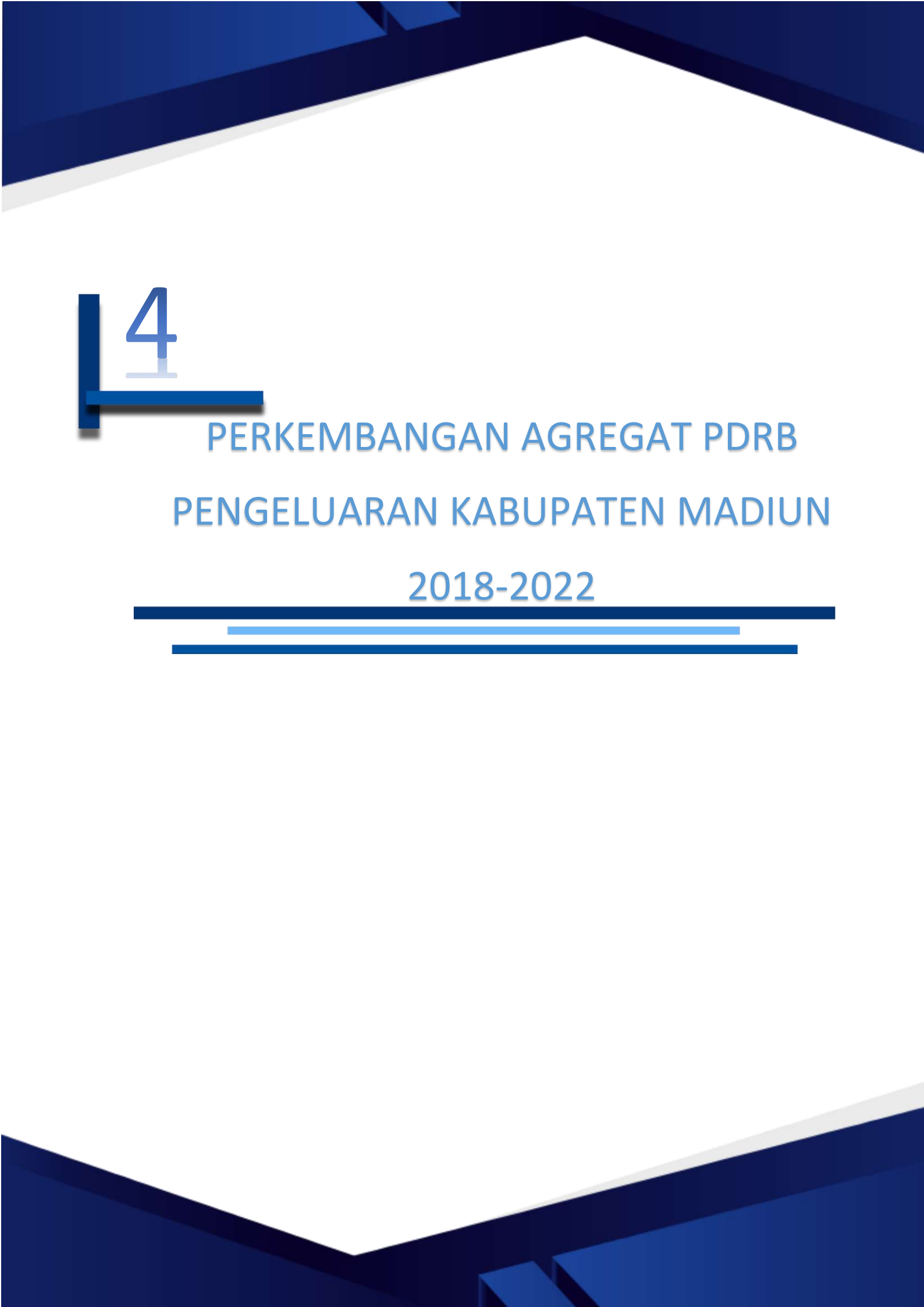
Data pada tabel 12 menunjukkan bahwa secara total nilai Ekspor Neto Barang dan Jasa Kabupaten Madiun berfluktuasi (baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010) pada kurun tahun 2018 sampai dengan 2022. Pada tahun 2018 nilai Ekspor Neto Barang dan Jasa atas dasar harga berlaku mencapai minus 3.878,06 miliar rupiah pada tahun

2018; minus 4.144,03 miliar rupiah 2019; minus 4.144,03 miliar rupiah pada tahun 2020; menjadi minus 3.627,46 miliar rupiah pada tahun 2021 dan minus 3.887,02 miliar pada tahun 2022.

Sejalan dengan nilai ekspor atas dasar harga berlaku, nilai ekspor barang dan jasa atas dasar harga konstan 2010 juga menunjukan arah yang sama. masing-masing tahun sebesar minus 2.086,47 miliar rupiah (2018); minus 2.108,66 miliar rupiah (2019); minus 1.675,14 miliar rupiah (2020); minus 1.661,57 miliar rupiah (2021) dan minus 1.797,96 miliar rupiah (2022).

Nilai negatif ekspor neto (defisit perdagangan) menunjukkan bahwa nilai ekspor suatu wilayah lebih kecil dibandingkan dengan nilai impornya. Defisit ini mengurangi PDRB dan mereduksi pertumbuhan ekonomi domestik. Perkembangan yang terjadi pada transaksi ekspor barang dan jasa dapat menunjukkan seberapa besar ketergantungan Kabupaten Madiun terhadap ekonomi atau produk wilayah lain, baik wilayah kabupaten/kota lain dalam satu propinsi, propinsi lain, maupun luar negeri.

Demikian juga dengan proporsinya, pada tahun 2018 ekspor neto barang dan jasa memberikan kontribusi sebesar minus 21,99 persen; minus 21,89 persen (2019); minus 17,92 persen (2020); minus 18,12 persen dan minus 17,77 persen (2022).



4

PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB
PENGELUARAN KABUPATEN MADIUN
2018-2022

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1. PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah ekonomi Kabupaten Madiun di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, dapat dilihat dari data PDRB perkapita

Tabel 13. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Madiun, 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
- ADHB	17.636,10	18.931,55	19.166,56	20.024,41	21.879,38
- ADHK 2010	12.485,01	13.161,84	13.146,12	13.582,73	14.169,62
PDRB per kapita (Juta Rp)					
- ADHB	25,88	27,72	25,81	26,69	28,88
- ADHK 2010	18,32	19,27	17,70	18,11	18,70
Pertumbuhan PDRB per kapita ADHK 2010	4,87	5,19	-8,15	2,28	3,29
Jumlah penduduk (org)	681.394	682.868	742.572	750.143	757.665
Pertumbuhan	0,22	0,19	1,14	1,02	1,00

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

4.2 PROPORSI PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Tabel 14. Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Madiun, 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) <i>(Miliar Rp)</i>					
a. Rumah tangga	12.720,58	13.596,30	13.675,65	14.348,39	15.908,22
b. LNPRT	362,90	393,39	398,02	407,87	430,31
c. Pemerintah	1.760,92	1.891,27	1.742,23	1.823,03	1.804,65
Jumlah	14.844,40	15.880,96	15.815,89	16.579,29	18.143,17
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	17.636,10	18.931,55	19.166,56	20.024,41	21.879,38
Proporsi	84,17	83,89	82,52	82,80	82,92

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

4.3 INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

"ICOR" merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah".

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap

pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit. Formula :

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Di mana: I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = Output tahun ke t

Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

Tabel 15. Incremental Capital Output Ratio Kabupaten Madiun, 2017-2021

Uraian	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHK 2010) (miliar rupiah)	12.485,01	13.161,84	13.146,12	13.582,73	14.169,62
Perubahan (miliar rupiah)	605,67	676,83	-15,72	436,61	586,89
PMTB (ADHK 2010) (miliar Rp)	4.206,85	4.429,19	4.224,14	4.265,49	4.360,62
ICOR	6,95	6,54	-268,69	9,77	7,43

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Data pada tabel 15 menunjukkan besaran ICOR berfluktuasi, dari sebesar 6,95 (2018) menjadi 7,43 (2022). Pada tahun 2019 ICOR menurun menjadi 6,54 dan terus menurun sangat signifikan menjadi minus 268,69 dampak terjadinya wabah Covid 19 pada tahun 2020, kemudian naik lagi pada tahun 2021 menjadi 9,77 dan tahun 2022 turun menjadi 7,43.

15

PENUTUP



1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2018-2022 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Madiun pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan luar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2018-2022, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa yang akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Pada tahun 2022 PDRB Kabupaten Madiun, sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), yaitu sebesar 72,71 persen, lembaga non profit yang melayani rumah tangga (PK-LNPRT) 1,97 persen, pemerintah (PK-P) 8,25 persen, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) 34,71 persen, perubahan inventori 1,10 persen dan ekspor neto minus 17,77 persen.
5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar daerah (*external account*) secara agregat disajikan di sini, seperti ekspor neto. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kabupaten Madiun terhadap ekonomi luar daerah.



Lampiran



Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran
Kabupaten Madiun, 2018-2022

(Juta Rupiah)

Uraian	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	12.720.582,17	13.596.300,02	13.675.645,38	14.348.391,60	15.908.219,58
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	362.902,91	393.388,90	398.018,02	407.870,53	430.307,83
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.760.915,64	1.891.267,13	1.742.226,25	1.823.027,67	1.804.646,16
Pembentukan Modal Tetap Bruto	6.394.882,62	6.910.751,65	6.660.684,93	6.850.494,91	7.382.085,77
Perubahan Inventori	274.868,76	283.877,26	124.238,14	222.086,28	241.144,79
Ekspor Neto Barang dan Jasa	-3.878.055,42	-4.144.034,21	-3.434.251,26	-3.627.456,93	-3.887.023,96
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	17.636.096,67	18.931.550,75	19.166.561,45	20.024.414,05	21.879.380,17

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran
Kabupaten Madiun, 2018-2022

(Juta Rupiah)

Uraian	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	8.881.949,03	9.269.479,24	9.173.555,5	9.499.180,3	9.499.180,3
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	237.688,07	252.566,65	253.054,27	258.429,70	258.429,70
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.091.473,39	1.163.050,10	1.117.822,08	1.124.787,69	1.124.787,69
Pembentukan Modal Tetap Bruto	4.206.846,6	4.429.185,70	4.220.605,77	4.274.182,81	4.274.182,81
Perubahan Inventori	153.524,30	156.218,26	67.059,42	116.526,07	116.526,07
Ekspor Neto Barang dan Jasa	-2.086.473,71	-2.108.659,74	-1.675.135,10	-1.661.573,30	-1.797.963,80
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	12.485.007,71	13.161.840,22	13.146.118,78	13.582.732,24	13.372.329,8

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Madiun, 2018-2022

Persen

Uraian	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	72,13	71,82	71,35	71,65	72,71
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,06	2,08	2,08	2,04	1,97
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	9,98	9,99	9,09	9,10	8,25
Pembentukan Modal Tetap Bruto	36,26	36,50	34,75	34,21	33,74
Perubahan Inventori	1,56	1,50	0,65	1,11	1,10
Ekspor Neto Barang dan Jasa	-21,99	-21,89	-17,92	-18,12	-17,77
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Madiun , 2018-2022

Persen

Uraian	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,59	4,36	-1,22	2,26	9,79
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	7,02	6,26	0,59	1,51	5,26
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,22	6,56	-3,72	-3,12	4,29
Pembentukan Modal Tetap Bruto	8,47	5,29	-4,63	-3,70	3,23
Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
Ekspor Neto Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5,10	5,42	-0,12	3,32	4,32

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 5. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100)
Menurut Pengeluaran Kabupaten Madiun, 2018-2022

Persen

Uraian	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	143,22	146,68	149,36	151,37	158,25
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	152,68	155,76	156,67	159,09	160,91
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	161,33	162,61	155,59	161,80	154,54
Pembentukan Modal Tetap Bruto	152,01	156,03	157,68	160,60	169,29
Perubahan Inventori	179,04	181,72	185,27	190,59	202,60
Ekspor Neto Barang dan Jasa	185,87	196,52	205,01	218,31	216,19
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	141,26	143,84	145,80	147,43	154,41

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 6. Laju Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100)
Menurut Pengeluaran Kabupaten Madiun Tahun 2018-2022

Persen

Uraian	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,81	2,42	1,83	3,20	5,95
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3,72	2,01	0,59	2,14	2,71
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,69	0,79	-4,32	-0,50	-0,67
Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,58	2,64	1,06	2,93	7,36
Perubahan Inventori	9,23	1,50	1,95	4,88	9,36
Ekspor Neto Barang dan Jasa	10,35	5,73	4,32	11,09	5,45
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	2,48	1,83	1,36	1,12	4,74

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MADIUN**
BPS-Statistics Of Madiun Regency
Jl. Raya Solo No.30 Jiwan, Madiun
Telp/Fax : 0351-463193
Email : bps3519@bps.go.id
Web : madiunkab.bps.go.id

